

DAFTAR ISIAN

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: MONBAI BEGUNUNK

Kecamatan: Kayan Hilir

Kabupaten: KAB. SINTANG

Provinsi: KALIMANTAN BARAT

Bulan: 1

Tahun: 2021

Nama Pengisi: INCAL

Pekerjaan: PERANGKAT DESA

Jabatan: SEKDES

Kepala Desa / Lurah: A Y U B

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN

UNTUK MENGISI PROFIL

DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : BIG

Referensi 2: BAPPEDA

Referensi 3:

Referensi 4:

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	278 orang	286 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	278 orang	269 orang
Persentase perkembangan	0 %	6.32 %

B. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	181 KK	14 KK	195 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	6 KK	14 KK	20 KK
Prosentase Perkembangan	2916.67 %	0 %	

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	orang

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera	181 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	4 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	8 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	35 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	134 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	362 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)

prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_tingkat/laporan_terkini_tingkat.php?&tahun=2021&kodesa=6107160043

1/17

D. SUBSEKTOR PERIKANAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN

Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada	0 jenis

F. SUBSEKTOR KERAJINAN

Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
Total jenis kerajinan rumah tangga	jenis

G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN**H. SUBSEKTOR KEHUTANAN**

Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00

I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN**I.1. Subsektor Perdagangan Besar**

Total nilai transaksi	Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan yang ada	Rp. 0,00
Total jumlah jenis perdagangan besar	Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total biaya antara lainnya	Rp. 0,00

I.2. Subsektor Perdagangan Eceran

Jumlah total jenis perdagangan eceran	jenis
Total nilai transaksi	Rp. 0,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total nilai aset perdagangan eceran	Rp. 0,00

I.3. Subsektor Hotel

Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada	jenis
Jumlah total pendapatan	Rp. 0,00
Jumlah total biaya pemeliharaan	Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00

I.4. Subsektor Restoran

Jumlah tempat penyediaan konsumsi	Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00

J. Sektor Bangunan/Konstruksi

Jumlah bangunan yang ada tahun ini	unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total nilai bangunan yang ada	Rp. 0,00
Biaya antara lainnya	Rp. 0,00

K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**K.1. Subsektor Bank**

Jumlah transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00

K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.3. Subsektor Sewa Bangunan	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	
Jumlah perusahaan jasa	Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
L.2. Subsektor jasa swasta	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
M.1. Subsektor Angkutan	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan	Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 0,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
N.1. Subsektor Listrik	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	Jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp 0,00
Jumlah total nilai transaksi	Rp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.2. Subsektor Gas	
Jumlah kegiatan penyediaan gas	jenis
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00
Nilai transaksi	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.3. Subsektor Air Minum	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 0,00
Nilai produksi air minum	Rp 0,00
Nilai transaksi air minum	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00

IV. PENDAPATAN PERKAPITA**A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha****B. PENDAPATAN RILL KELUARGA**

Jumlah Kepala Keluarga	181 KK
Jumlah Anggota Keluarga	383 orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 300.000,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 100.000,00

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

1. Sektor Pertanian	
Petani	orang
Buruh Tani	orang
Pemilik Usaha Tani	orang
2. Sektor Perkebunan	
Karyawan Perusahaan Perkebunan	orang
Buruh perkebunan	orang
Pemilik usaha Perkebunan	orang
3. Sektor Peternakan	
Peternakan Perorangan	orang
Buruh Usaha Peternakan	orang
Pemilik Usaha Peternakan	orang
4. Sektor Perikanan	
Nelayan	orang
Buruh Usaha Perikanan	orang
Pemilik Usaha Perikanan	orang
5. Sektor Kehutanan	
Pengumpul Hasil Hutan	orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	orang
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
Penambang Galian C Perorangan	orang
Buruh Usaha Pertambangan	orang
Pemilik Usaha Pertambangan	orang
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
8. Sektor Industri Menengah dan Besar	
9. Sektor Perdagangan	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	orang
10. Sektor Jasa	

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT**A. ASET TANAH**

Tidak memiliki tanah	orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	orang

Jumlah total penduduk	orang
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM	
C. ASET SARANA PRODUKSI	
Memiliki penggilingan padi	orang
Memiliki traktor	orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	orang
Memiliki kapal penangkap ikan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	orang
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING	
RUMAH MENURUT LANTAI	
RUMAH MENURUT ATAP	
VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA	
VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT	
A. Tingkat Pendidikan Penduduk	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	orang
Jumlah penduduk sedang D-1	orang
Jumlah penduduk tamat D-1	orang
Jumlah penduduk sedang D-2	orang
Jumlah penduduk tamat D-2	orang
Jumlah penduduk sedang D-3	orang
Jumlah penduduk tamat D-3	orang
Jumlah penduduk sedang S-1	orang
Jumlah penduduk tamat S-1	orang
Jumlah penduduk sedang S-2	orang
Jumlah penduduk tamat S-2	orang
Jumlah penduduk tamat S-3	orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	orang
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	orang
C. Rasio Guru dan Murid	
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	orang

6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	orang
7. Jumlah guru SLTA/sederajat	orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat	orang
9. Jumlah siswa SLB	orang
10. Jumlah guru SLB	orang
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	unit
Jumlah perpustakaan keliling	unit
Jumlah sanggar belajar	unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	orang
IX. KESEHATAN MASYARAKAT	
A. Kualitas Ibu Hamil	
Jumlah ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	0 orang
Jumlah ibu nifas	0 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	0 orang
B. Kualitas Bayi	
Jumlah keguguran kandungan	0 orang
Jumlah bayi lahir	0 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	0 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang
C. Kualitas Persalinan	
Tempat Persalinan	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit
Tempat persalinan Puskesmas	0 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	0 unit
Tempat praktek dokter	0 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
Pertolongan Persalinan	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
D. Cakupan Imunisasi	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	0 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	0 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	0 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	0 orang

Jumlah bayi usia 4 bulan	0 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	0 orang
Jumlah bayi 9 bulan	0 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	0 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	0 orang
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	
Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	0 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	0 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	0 pasangan
Keluarga Berencana	
Jumlah akseptor KB	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	0 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang
F. Wabah Penyakit	
G. Angka Harapan Hidup	
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	0,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	0,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	0,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	0,00 Tahun
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih	
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	0 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	0 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	0 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 Keluarga
Total jumlah keluarga	0 Keluarga
I. Perilaku hidup bersih dan sehat	
Kebiasaan buang air besar	
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	0 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	0 Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	0 Keluarga
Pola makan	
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	
Kebiasaan berobat bila sakit	
Dukun Terlatih	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	
Paranormal	
Obat tradisional dari keluarga sendiri	
Tidak diobati	
J. Status Gizi Balita	

Jumlah Balita	0 orang
Jumlah Balita bergizi buruk	0 orang
Jumlah Balita bergizi baik	0 orang
Jumlah Balita bergizi kurang	0 orang
Jumlah Balita bergizi lebih	0 orang

K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini

Jenis penyakit	Jumlah penderita	Di rawat di
----------------	------------------	-------------

L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

Jumlah MCK Umum	0 unit
Jumlah Posyandu	0 unit
Jumlah kader Posyandu aktif	0 orang
Jumlah pembina Posyandu	0 orang
Jumlah Dasawisma	0 Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	0 orang
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	0 orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	0 orang
Buku rencana kegiatan Posyandu	
Buku data pengunjung Posyandu	
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	
Buku administrasi Posyandu lainnya	0 jenis
Jumlah kegiatan Posyandu	0 jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya	0 orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	0 jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	0 jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	0 jenis
Lainnya	0 jenis

X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN**A. Konflik SARA**

Kasus konflik pada tahun ini	kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus pertengkar dan atau perkelahian antar tetangga	kasus
Jumlah kasus pertengkar dan atau perkelahian antar RT/RW	kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	orang

B. Perkelahian

Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	orang

C. Pencurian

Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	orang

D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah

Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	kasus
--	-------

Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	orang
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	kasus
Jumlah pengedar Narkoba	orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	orang
G. Prostitusi	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	orang
Lokalisasi prostitusi	
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	kali
H. Pembunuhan	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus bunuh diri	kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	kasus
I. Penculikan	
Jumlah kasus penculikan	kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	kasus
J. Kejahatan seksual	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	unit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
Jumlah gelandangan	orang
Jumlah pengemis jalanan	orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	orang
Jumlah orang cacat fisik	orang
Jumlah orang kelainan kulit	orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	unit
Jumlah panti jompo	unit
Jumlah panti asuhan anak	unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	orang
Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun	orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	orang
Jumlah anak yatim piatu 0-18 tahun	orang
Jumlah janda	orang

Jumlah duda	orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat	orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat	orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat	orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	orang
Jumlah penduduk eks NAPI	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekeringan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	orang

L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	kasus

M. Teror dan Intimidasi

Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	kasus

N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

Organisasi Siskamling	
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	
Buku anggota Hansip dan Linmas	jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	Pos

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	kasus

Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	kasus
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi	
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	jenis
Jumlah Wajib Pajak	orang
Target PBB	Rp 0,00
Realisasi PBB	0,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar	kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	kasus
C. Partisipasi Politik	
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	pemilih
2. Pemilihan Kepala Daerah	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	pemilih
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	
Penentuan Sekretaris Desa	
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	
Masa jabatan Kepala Desa	tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	
4. Pemilihan BPD	
Jumlah anggota BPD	orang
Penentuan anggota BPD	
Pimpinan BPD	
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	
Anggaran untuk BPD	
Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa kali 3. Rancangan Peraturan Desa. buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa kali

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	0,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	

C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan**

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	0,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	0,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	0,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	0,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	. kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	. kegiatan

2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	0,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	0,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	0,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	0,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	

Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	kegiatan
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	
Jumlah kelompok arisan	buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	orang
Ada tidaknya dana sehat	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	
4. Adat Istiadat	
Adat istiadat dalam perkawinan	
Adat istiadat dalam kelahiran anak	
Adat istiadat dalam upacara kematian	
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	
Adat istiadat dalam tanah pertanian	
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	
5. Sikap Dan Mental Masyarakat	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	
Etos Kerja Penduduk	
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	

Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	

XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN**A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN**

Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Tidak
Jumlah kegiatan	Jenis

B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan**

Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 0,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 0,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 0,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat	Rp 0,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 0,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 0,00

B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD	
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	kasus

C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan**1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**

Gedung Kantor	-
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	
Listrik	
Air bersih	
Telepon	

1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor

Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	unit

1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Buku Data Peraturan Desa	
--------------------------	--

Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	
Buku Administrasi Kependudukan	
Buku Data Inventaris	
Buku Data Aparat	
Buku Data Tanah Kas Desa	
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	
Buku Data Tanah	
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	
Buku Agenda Ekspedisi	
Buku Profil Desa dan Kelurahan	
Buku Data Induk Penduduk	
Buku Data Mutasi Penduduk	
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	
Buku Data Penduduk Sementara	
Buku Anggaran Penerimaan	
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	
Buku Kas Umum	
Buku Kas Pembantu Penerimaan	
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Gedung Kantor	
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai BPD	-
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
2.B. Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	
Buku Administrasi Keanggotaan	
Buku kegiatan BPD	
Buku himpunan peraturan desa	
Buku Lainnya	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jenis kegiatan	Jenis
Jumlah pengurus	Orang
Jumlah ruang kerja	Ruang
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD	
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	kali

Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	kali
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	kasus
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	kali

KAB. SINTANG, 27 Januari 2021
MONBAI BEGUNUNK
Kecamatan Kayan Hilir
Kabupaten KAB. SINTANG

AYUB
Kepala Desa

Tembusan :

1. Camat Kayan Hilir
2. Bupati KAB. SINTANG
3. Arsip